

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Aden Rosadi dkk, 2020, *Kekuasaan Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan kedua, Depok.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asima Yanty Siahaan dkk, 2022, *Transformasi Pembangunan melalui Pelayanan Publik*, PT. Pena Persada Kerta Utama, Jawa Tengah.
- Dhoho A. Sastro dkk, 2010, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta.
- Joko Pramono, 2020, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, UNISRI Press, Surakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Nurul Qamar, 2016, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrul Mustofa, 2020, *Hukum keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Guepedia, Mataram.
- Tuti Harwati, 2015, *Peradilan di Indonesia*, Sanabil, Cetakan Pertama, Mataram.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. SUMBER LAIN

- Aida Fitriani, 2023, 'Keterbukaan Informasi Publik', *Jurnal Fokus*, Vol.I, No 1.
- Alno putra Ladperesi Ulaan, 2022, 'Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Di Dinas Komunikasi Dan Informatika DiKabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Governance*, Vol. II, No 1.
- Arumbela Bangun Negara dkk, 2022, 'Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik', *Jurnal Kolaboratis Sains*, Vol. 05, No. 05.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat 2024, *Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi Badan Publik*, 28 Agustus 2024, ruang Lingkup Tugas Dan Fungsi Badan Publik - Situs Resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, (diakses pada 24 Oktober 2024)
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Tentang Direktori Putusan*, Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), (diakses pada 9 Oktober 2024)
- Fitria, A. (2020). 'Keterbukaan Informasi dan Kepercayaan Publik: Studi Kasus di Pengadilan Negeri', *Jurnal Hukum*, No. 22.
- Haedar Akib, 2010, 'Implementasi Kebijakan: Apa,Mengapa dan Bagaimana', *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1.
- Iskandar, A. (2020). 'Akuntabilitas Lembaga Peradilan dalam Konteks Keterbukaan Informasi', *Jurnal Hukum*, No. 28.
- JDIH Mahkamah Agung 2022, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan*, JDIH Mahkamah Agung RI, (diakses pada 24 Oktober 2024)
- Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019, 'Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik', *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 2.
- Lathifah Chairunnisa, 2023, 'Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang', *Jurnal Ilmu Administrasi, Negara (AsLAN)*, Vol. 11, No. 2.

Meray Hendrik Mezak, 2006, 'Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum', *Law Review*, Vol. v, No. 3.

Pengadilan Tinggi Padang 2023, *Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Tingkat Banding*, 10 Februari 2023, Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Tingkat Banding – Pengadilan Tinggi Padang (pt-padang.go.id), (diakses pada 9 Oktober 2024)

Ridwan Mansyur, 2015, 'Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1.

Sudibyo, A. (2018). 'Peran Media dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik' *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 9.